

ABSTRAKSI

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang merusak generasi bangsa, karena dilakukan secara terorganisir, rapi, dan rahasia. Sehingga upaya pemeriksaan dalam proses penyidikannya harus di percepat dan di utamakan oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan menggunakan teknik khusus yaitu teknik pembelian terselubung. Pada prakteknya teknik ini dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu sangat perlu untuk menganalisis penerapan dan akibat hukum dari penggunaan teknik pembelian terselubung dalam pengungkapan tindak pidana narkoba.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menganalisis literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan terkait yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Terhadap penelitian ini penulis mengambil studi kasus pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah (DITRESNARKOBA POLDA JATENG).

Hasil daripada penelitian yang telah dilakukan penerapan teknik pembelian terselubung dalam penyidikan tindak pidana narkoba dilakukan dengan cara pihak kepolisian bertindak seolah-olah sebagai pembeli dalam transaksi gelap narkoba. Tindakan tersebut sejatinya masuk dalam rumusan delik dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114, Pasal 119 serta Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi, terdapat alasan penghapus pidana dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menghapus unsur sifat melawan hukum dalam tindakan tersebut.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkoba, Pembelian Terselubung

ABSTRACT

Narcotics crime is an extraordinary crime which damages the nation's generation, because it's done by organized, neat and secret. So that examination effort within that investigation process must be accelerated dan prioritized by the police. The process of investigating narcotics crime can be carried out using a special technique that is covert buying technique. In practice this technique can lead to abuse of authority, therefore it is very necessary to analyze the application and legal consequences of using covert purchasing techniques in the disclosure of narcotics crime.

This research was conducted using qualitative methods and a sociological juridicial approach, that is analyzing the literature and related laws and regulations applied in people's lives. Regarding this research authors took a case study at the Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah (DITRESNARKOBA POLDA JATENG).

The results of this research that has been carried out by the application of covert purchasing techniques in narcotics crime investigations are carried out by the police actings as a buyer in illicit narcotics transactions. These actions are actually included in the formulation of offenses and are punishable by criminal sanctions in Pasal 114, Pasal 119 and Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. However, there are reasons for the elimination of crime in Pasal 50 and Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) which removes the element of lawlessness in that action.

Keywords: *Criminal Act, Narcotics, Covert Purchasing*

